

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM
SEKOLAH SUNGAI DI SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

PALUPI MAYASARI

NIM : C.100.140.343

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM
SEKOLAH SUNGAI DI SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

PALUPI MAYASARI

NIM : C.100.140.343

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Absori', with a horizontal line underneath it.

(Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM
SEKOLAH SUNGAI DI SURAKARTA

Yang ditulis oleh :

PALUPI MAYASARI

C.100.140.343

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : 07 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

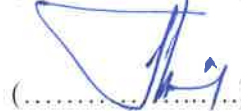
Ketua : Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum

()

Sekretaris : Iswanto., S.H., M.H.

()

Anggota : Jaka Susila., S.H., M.Si.

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

(Prof. Dr. Khuzdaifah Dimyati, S.H., M. Hum)

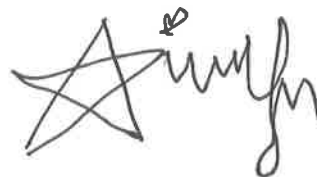
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized star-like symbol on the left and a cursive script on the right.

PALUPI MAYASARI

NIM : C100.140.343

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH SUNGAI DI SURAKARTA

ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya tekanan terhadap lingkungan. Yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup saat ini kondisinya memprihatinkan, terjadi kecenderungan perubahan ekosistem sungai yang ditunjukkan dengan adanya degradasi kuantitas dan kualitas air. Hampir sebagian besar daerah aliran sungai di Indonesia mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan yang terjadi pada sungai diakibatkan oleh aktivitas manusia yang membuang sampah dan limbah pada daerah aliran sungai. Segala macam sampah dan limbah dibuang ke daerah aliran sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sehingga air sungai tercemari. Itulah yang menyebabkan sungai-sungai di daerah kota besar seperti kota Surakarta mengalami penurunan pada kualitas air. Penelitian ini berjudul “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Sekolah Sungai di Surakarta” dengan rumusan masalah: Bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta dan Bagaimana model sekolah sungai dalam mewujudkan sungai yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai dan mengetahui model dari sekolah sungai untuk mewujudkan sungai yang berkelanjutan. Kesimpulannya kebijakan berkaitan dengan sekolah sungai di Surakarta ini dibentuk karena semakin menurunnya fungsi sungai. Sungai di Surakarta sendiri sudah hampir 90% mengalami pencemaran. Dalam rangka mewujudkan sungai yang berkelanjutan, program sekolah sungai memiliki model yang telah terancang sistematis. Baik dari segi sasaran utama program sekolah sungai, segi anggaran, segi keaparatan, dan segi informatika.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan Lingkungan, Sekolah Sungai

ABSTRACT

Along with the increase of economy activity development and the growth of population cause the height pressure to the environment. In the end, it will damage the environment itself. The river as the part of living environment is in the apprehensive condition, it tends to happen the canging of the river ecosystem that showed by the degradation of quantity and quality of the water. Most of the river flow area in Indonesia is damaged. Most of the damage is caused by human activity throwing rubbish and waste in the river flow. All of the rubbish and waste throw to the river without processed first, so the water is tainted. It causes the river in the big city such as Surakarta experiences the decrease of the water quality. This research is entitled "The Policy of Environment Process Through the School River Program in Surakarta with the problem statement" How the policy of environment process the the school river program in Surakarta and How is the

model of school river in realizing the sustainable river. The conclusion is the policy that relates with school river in Surakarta is created because of the decrease of river function. The river in Surakarta is almost 90% tainted. In realizing the sustainable river, the school river program has the systematic model. Both in the main target of school river program, budget, apparatus and informatics

Keywords : *policy, management of the environment, river schools.*

1. PENDAHULUAN

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di manamana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau.¹ Hal tersebut mencerminkan semakin rusaknya lingkungan hidup.

Membicarakan hubungan masyarakat manusia dan lingkungan secara kodrati sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai *biotic community*. Manusia dan komunitasnya di samping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.² Karena itu, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lingkungan melebihi dari kadar yang ada, apalagi bertindak melampaui batas terhadap alam.³

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

¹ Absori, S. H., & Hum, M. (2005). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA ERA REFORMASI. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 221. Diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 17.10.

² Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 80.

³ Absori, A. (2017). ADVOKASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR. *Warta LPM*, 10(1). Hal 69. Diakses pada hari Rabu, 17 Januari 2018 pukul 18.32.

Sudah sejak dahulu terdapat hubungan antara kehidupan manusia dengan sungai. Tempat tinggal manusia banyak yang berada berdekatan dengan sungai, karena di dalam kehidupannya manusia membutuhkan air, yang dengan mudah didapatkan dari sungai. Sungai juga sudah lama dimanfaatkan sebagai sumber air untuk berbagai macam kebutuhan hidup manusia, dari air untuk keperluan rumah tangga, irigasi, perikanan, pariwisata bahkan sungai pun dapat digunakan sebagai sarana transportasi.⁴

Fungsi ekosistem sungai tersebut sangat penting terhadap ketersediaan sumber daya air. Namun demikian, hampir sebagian besar daerah aliran sungai di Indonesia sudah mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan yang terjadi pada sungai diakibatkan oleh aktivitas manusia yang membuang sampah rumah tangga, sampah hotel dan limbah pabrik pada daerah aliran sungai. Segala macam sampah dan limbah dibuang ke daerah aliran sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sehingga air sungai tercemari. Itulah yang menyebabkan sungai-sungai di daerah kota besar seperti kota Surakarta mengalami penurunan pada kualitas air dan mulai kritis.

Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata.⁵ Pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pembangunan yang memperhatikan lingkungan, melestarikan fungsi ekosistem yang mendukungnya, pemanfaatan kegiatan untuk berkembang secara bersama-sama dan sambung menyambung, memperoleh dukungan masyarakat luas yang berperan aktif dan menggunakan prosedur tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem, baik masa kini maupun yang akan datang.⁶

Peran aktif dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola sungai untuk menanggulangi terjadinya kerusakan sungai. Hal ini bertujuan untuk

⁴ Darmakusuma Darmanto, Sudarmadji. 2013. PENGELOLAAN SUNGAI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DI DAERAH LERENG SELATAN GUNUNG MERAPI. Jurnal Manusia dan Lingkungan, vol. 20, No. 2, hal 230. Diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 17.10

⁵ Absori, S. H., & Hum, M. DEKLARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA. Di akses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 14.04

⁶ Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisi pasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 13-14.

mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan, yang terbebas dari pencemaran. Maka diperlukanlah wadah khusus bagi masyarakat untuk memahami dan memberikan kesadaran bagi masyarakat supaya lebih menyadari peran pentingnya kesehatan sungai.

Untuk menanggulangi permasalahan fungsi sungai yang mulai kritis, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta bersama pemerintah kota Surakarta mengadakan program sekolah sungai. Program ini sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk merestorasi sungai sehingga kembali kepada fungsinya guna mewujudkan sungai yang berkelanjutan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH SUNGAI DI SURAKARTA.**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta, Bagaimana model sekolah sungai dalam mewujudkan sungai yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugeng Iswanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.⁷

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.⁸

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil satu lokasi penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solo dan Posko Sibat Kampung Sewu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

⁷ F. Sugeng Iswanto, 2017, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 29.

⁸ Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 38

adalah penelitian Empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solo dan Posko Sibit Kampung Sewu yang mengenai obyek kebijakan yang diteliti. Dan data sekunder yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya.⁹

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Sekolah Sungai di Surakarta

Timbulnya suatu kebijakan itu karena adanya suatu masalah yang terjadi dan dibutuhkanlah sebuah penyelesaian masalah tersebut. Untuk menyelesaikan atau mengetasi permasalahan yang terjadi, maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yang mengaturnya.

Terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai di Surakarta ini Arief Fahmi Rahmansyah selaku Staff Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta mengatakan: “Dari segi kebijakan kita di lingkup pemerintah kota untuk mempopulerkan program sekolah sungai. Sekolah sungai di bentuk di Surakarta bertujuan untuk mengembalikan atau merestorasi sungai agar di kembalikan pada fungsinya. Dulu seusia saya kecil kita bermain di sungai masih jernih airnya bahkan untuk mandi dan mencuci masih enak. Tapi kan sekarang kita lihat saja

⁹ Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pers, hal.12

¹⁰ Muhammad Nazir. 1986. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 159

untuk di kawasan sungai di Surakarta hampir 90% tercemar. Makanya kita restorasi bagaimana kita membuat sebuah trobosan untuk mengedukasi masyarakat. Sekolah sungai adalah edukasi kepada masyarakat, bukan seperti sekolah formal. Sekolah sungai adalah bentuk dari edukasi kepada masyarakat. Kita ajak kerja bareng, kerja bakti di sungai. Kerja bakti di sungai itu enak. Tujuannya kalau kita dan masyarakat ikut terjun kerja bakti sungai otomatis dia akan malu jika membuang sampah di sungai.”¹¹

Dari segi sasaran utama program sekolah sungai itu sendiri adalah anak-anak. Seperti yang di sampaikan oleh Arief Fahmi Rahmansyah selaku Staff Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta berkaitan dengan sasaran program sekolah sungai :¹² “Sarannya satu adalah Anak-anak. Kedua, Masyarakat umum. Karena anak-anak itu jenjangnya lebih lama. Kita memberikan masukan edukasi itu lebih enak dan lebih cepat untuk program kedepannya. Mungkin kelas pelajar lebih enak daripada kelas mahasiswa. Kalau dari anak-anak kalau lebih enak, nanti dibuat permainan. Ini sudah di programkan di kampung Sewu, nanti ada flaying fox, ada outbond untuk edukasi kepada anak-anak.”

Menurut Tachjan Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : “(1) unsur pelaksana (implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups”

Program sekolah sungai ini telah memenuhi ketiga unsur implementasi kebijakan. Yang pertama adalah unsur pelaksana, dalam program sekolah sungai ini yang berperan sebagai pelaksana utama adalah pemerintah kota Surakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta. Kemudian di bantu Organisasi Perangkat Daerah serta para relawan.

Yang kedua yaitu terkait program yang akan dilaksanakan. Disini program yang akan dilaksanakan adalah program sekolah sungai yang didalamnya terdapat edukasi tentang restorasi sungai.

¹¹ Arief Fahmi Rahmansyah, Staff Kedaruratan dan Logistik Badan Penganggulangan Bencana Daerah Surakarta, Surakarta, 22 Oktober 2017, pukul 10.48

¹² Arief Fahmi Rahmansyah, Staff Kedaruratan dan Logistik Badan Penganggulangan Bencana Daerah Surakarta, Surakarta, 22 Oktober 2017, pukul 10.59

Kemudian target groups yaitu seluruh elemen masyarakat. Termasuk pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum. Namun target utamanya adalah anak-anak.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia itu memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia juga memajukan kesejahteraan umum. Negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya budaya. Lebih lanjut lagi diatur dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya diatur dalam Pasal 33 ayat (4) menentukan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Atas dasar dari ketentuan Undang-Undang Dasar ini, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya melalui proses yang bersifat lentur. Di kota Surakarta kini seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya tekanan terhadap lingkungan. Yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup saat ini kondisinya memprihatinkan, terjadi kecenderungan perubahan ekosistem sungai yang ditunjukkan dengan adanya degradasi kuantitas dan kualitas air.

Pencemaran yang terjadi pada sungai di Surakarta ini otomatis telah melanggar konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat pada Pasal

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup berkaitan dengan problematika kerusakan fungsi sungai, maka di buatlah suatu kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai.

Bentuk dari sekolah sungai ini adalah berupa edukasi. Jadi tidak seperti halnya sekolah formal. Sekolah sungai di bentuk di Surakarta bertujuan untuk mengembalikan atau merestorasi sungai agar di kembalikan pada fungsinya.

3.2.Model Sekolah Sungai dalam Mewujudkan Sungai yang Berkelanjutan

Sungai merupakan urat nadi kehidupan manusia. Karena begitu pentingnya peran sungai bagi kehidupan, maka fungsi sungai ini harus tetap terjaga agar bisa tetap di nikmati dari generasi kegenerasi.

Di Indonesia sendiri memiliki banyak sungai yang tersebar diberbagai daerah. Namun sayangnya sungai-sungai di Indonesia ini banyak yang tidak terawat, bahkan sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi di sungai itu karena dua faktor yaitu yang pertama, karena limbah yang di buang disungai. Limbah ini dapat berupa limbah rumah tangga, sampah hotel dan limbah pabrik. Kemudian yang kedua yaitu karena kerusakan daya dukung sungai, seperti tanggul yang sudah rusak dan sebagainya.

Pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan. Karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secara lebih konkrit tidak bisa disangkal bahwa hak manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan baik menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹³

¹³ Charis, Abdul and , Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum (2017) *Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development Di Kota Semarang*. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 13.21.

Sebuah ekologi sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia.¹⁴ Jadi, manusia sangat berpengaruh dalam keberlanjutan suatu ekologi. Dia bisa berpotensi sebagai perusak ataupun penyelamat ekologi. Maka dari itu setiap manusia harus bisa menjadi penyelamat ekologi supaya keberlanjutan ekologi tetap terjaga dengan cara pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan menjawab tantangan permasalahan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan sampah kota.¹⁵ Sampah juga bisa berupa limbah pabrik yang kemungkinan menimbulkan sengketa lingkungan hidup. Dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup, masyarakat harus mencari jalan keluar melalui berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan dalam rangka mencapai keadilan masyarakat dan lingkungan.¹⁶ Sampah merupakan masalah utama penyebab banjir di daerah sungai. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap lingkungan hidup membuat permasalahan kerusakan pada fungsi lingkungan hidup, termasuk rusaknya fungsi sungai.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai daerah aliran sungai terbesar yaitu sungai Bengawan Solo. Selain Bengawan Solo, di Surakarta juga mempunyai banyak anak sungai. Di saat musim penghujan tiba sungai-sungai ini menjadi rawan banjir. Dan bahkan kota Surakarta sudah menjadi langganan banjir ketika musim hujan. Hal ini dikarenakan meluapnya sungai-sungai karena fungsi sungai yang sudah mulai rusak.

Untuk mengatasi degradasi fungsi sungai di Surakarta ini, maka di Surakarta diadakan program sekolah sungai. Program sekolah sungai ini merupakan wadah edukasi kepada masyarakat untuk restorasi sungai. Di dalam

¹⁴ Hamdi, M., Dimiyati, K., Absori, S. H., & Hum, M. (2016). *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Di akses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 14.11

¹⁵ Sulistyowati, S. (2006). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat Dalam Amdal Di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 14.08.

¹⁶ Absori, Khuzaefah Dimiyati, Kelik Wardiono. 2008. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif. *Mimbar Hukum* Jilid 20 terbitan ke II. Hal 367. Diakses pada hari Kamis, 08 Februari 2018 pukul 07.21.

sekolah sungai ini berisi sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap sungai. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta yang bekerjasama dengan pemerintah kota Surakarta.

Tujuan di bentuknya program sekolah sungai ini adalah untuk mengembalikan fungsi sungai yang telah rusak. Untuk itu maka perulah di buat model-model sekolah sungai yang dapat mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan model sekolah sungai dalam mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan ini Arief Fahmi Rahmansyah selaku Staff Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta mengatakan:¹⁷ “Sekarang di surakarta baru ada satu sekolah sungai. Namanya sekolah sungai Solo. Bentuknya kita sosialisasi kepada masyarakat, kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu berbagai dinas disitu kita bentuk supaya sama-sama untuk mengurangi resiko bencana.”

Sedangkan model sekolah sungai dalam mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan menurut Sri Mahanani Budi Utomo ini lebih mengerucut lagi bahwa “Kita bekerjasama dengan banyak pihak.salah satunya perum jasa tirta. Istilahnya mereka yang bergerak dibidang pengeturan air sungai. Dengan UNS yang notabennya akademisi kan mereka punya bidang keilmuan dalam masyarakat. Melakukan gerakan yang terus menurun agar masyarakat. Dari akademisi sebenarnya juga banyak ide tapi ya dalam perwujudannya perlu biaya besar.”

Jadi model sekolah yang telah di terapkan di Surakarta ini lebih pada bentuk pensosialisasian kepada masyarakat terkait restorasi sungai. Dan dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak, baik dari pemeritah, pengusaha dan akademisi. Namun model sekolah sekolah sungai seperti itu belum bisa mewujudkan sungai yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan program sekolah sungai yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Arief Fahmi Rahmansyah, Staff Kedaruratan dan Logistik Badan Penganggulangan Bencana Daerah Surakarta, Surakarta, 22 Oktober 2017, pukul 11.15

Menurut hemat penulis bahwa sekolah sungai ini dapat mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan dengan model-model sebagai berikut: Menumbuhkan kesadaran akan keyakinan masyarakat terhadap ajaran yang di anutnya. Dalam hal ini lebih di kerucutkan pada ajaran agama yang berkaitan dengan lingkungan hidup, Seperti halnya yang dikatakan Absori dalam kacamata teologi lingkungan, bahwa kesadaran keyakinan masyarakat dapat merubah persepsi menjadi realitas. Dengan ini Abdillah berkeyakinan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi dapat didayagunakan untuk membangun kesadaran lingkungan masyarakat. Akumulasi gerakan kesadaran lingkungan akan semakin kuat tumbuh di kalangan masyarakat dengan penanaman pemahaman bahwa mencintai, memelihara, dan melestarikan lingkungan merupakan bagian dari ibadah.¹⁸ Dalam sudut pandang Islam (profetik), Alam dimaknai sebagai sesuatu yang sakral, diciptakan Allah, sebagai salah satu objek menggali ilmu-kebesaran Allah, dan pada akhirnya semakin mendekatkan diri manusia pada keimanan (transedensi).¹⁹

Menurut Absori nilai-nilai Transendental yang mengakui adanya otoritas ketuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jejak kehidupan Indonesia modern, pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.²⁰ Pemikiran transendental dapat dilihat pada nilai nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh

¹⁸ Sri Sunarjono , Khudzaifah Dimyati , Absori. 2010. KEBIJAKAN STRATEGI PENGGUNAAN GREEN TECHNOLOGY UNTUK PRESERVASIINFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS KUALITAS HIDUP MASYARAKAT:sebuah gagasan dan usulan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 13.33.

¹⁹ Absori, Khudzaifah Dimyati, Ridwan. 2017.Makna Pengelolaan Lingkungan Prespektif Etik Profetik. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam. Hal 332. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018 pukul 19.39.

²⁰ Rizka, R., Khudzaifah Dimyati, S. H., Hum, M., Absori, S. H., Hum, M., & Lamsudin, R. (2017). *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transendental* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Hal 21. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018 pukul 20.32.

dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang.²¹

Jadi penanaman kesadaran ini lebih merujuk pada media dakwah setiap agama. Dakwah bisa dilakukan oleh fasilitator sekolah sungai saat pelaksanaan sekolah sungai. Dakwah dengan penyadaran akan pentingnya lingkungan hidup melalui penanaman pemahaman bahwa mencintai, memelihara, dan melestarikan lingkungan merupakan bagian dari ibadah. Dengan itu maka akan menumbuhkan nilai-nilai tersebut dalam diri manusia. Selain itu dengan penanaman nilai melalui media dakwah agama akan membuat manusia lebih condong untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Legislasi kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini telah dibatasi terkait ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan hidup ini juga terdapat aspek penegakan hukumnya.

Namun karena di dalam sekolah sungai ini tidak mengandung muatan penegakan hukumnya. Jadi program ini hanya sekedar pengenalan dan implementasi tentang cara restorasi sungai. Seperti pengelolaan sampah dan pengelolaan air hujan saja.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai ini tidak berorientasi pada penegakan hukum. Hal ini juga yang menjadi kelemahan dari program sekolah sungai ini. Karena pembuatannya tidak merujuk kepada hukum atau tidak berorientasi pada penegakan hukum. Sehingga tidak mempunyai

²¹ Absori. 2017. *Pemikiran Hukum Transedental Dalam Konteks Ilmu Hukum Indonesia*. Hal 8. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018 pukul 19.53.

kewenangan yang memaksa masyarakat untuk mengikutinya. Jadi kebijakan pengelolaan lingkungan melalui program sekolah sungai ini masih dikata belum sempurna dan belum sesuai dengan teori kebijakan publik.

Dalam rangka mewujudkan sungai yang berkelanjutan, program sekolah sungai memiliki model yang telah terancang sistematis. Kelemahannya yaitu dalam program sekolah sungai ini tidak berorientasi pada penegakan hukum. Jadi program ini hanya sekedar pengenalan dan implementasi tentang cara restorasi sungai. Seperti pengelolaan sampah dan pengelolaan air hujan saja. Maka dari itu perlunya di buat suatu model sekolah sungai yang benar-benar terkonsep berdasarkan peraturan perundang-undangan supaya dalam menciptakan fungsi sungai yang berkelanjutan dapat terwujud dengan baik.

4.2.Saran

Kepada pemerintah pusat agar melagalisasi program sekolah sungai ini. Sehingga sekolah sungai ini tidak hanya berlaku di daerah rawan bencana banjir saja. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak wilayah sungai dan potensi pencemaran air sungai tidak hanya dilakukan oleh masyarakat daerah yang rawan banjir. Sehingga perlunya program sekolah sungai ini di berlakukan di berbagai daerah. Agar kesadaran masyarakat akan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup bisa semakin tumbuh.

Kepada pemerintah daerah agar mengerakkan supaya program sekolah sungai ini mampu menjadikan sungai sebagai ekowisata. Karena ekowisata ini selain memberikan wawasan lingkungan juga mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar.

Kepada masyarakat umum agar lebih sadar akan pentingnya lingkungan hidup dan tidak lagi membuang sampah sembarangan.

Kepada para pengusaha agar lebih mempedulikan lingkungan hidup dan tidak lagi membuang limbah secara sembarangan atau tidak terolah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Iswanto, F. Sugeng, 2017, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta
- Maifai, Muh Aris, 2005, *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan, Wahana Hijau dan Kreasi Wacana*, Yogyakarta
- Nazir, Muhammad. 1986. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, D, Riant, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Silalahi, M. Daud, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers.
- Zainal Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maifai, Muh Aris. 2005. *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan, Wahana Hijau dan Kreasi Wacana*, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani. (2017). KONSEP UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Publik* volume 11, 1. Diakses pada hari Selasa 21 November 2017 pukul 22.14
- Absori, S. H., & Hum, M. (2005). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA ERA REFORMASI. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 221. Diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 17.10.
- Absori, A. (2017). ADVOKASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR. *Warta LPM*, 10(1). Hal 69. Diakses pada hari Rabu, 17 Januari 2018 pukul 18.32

- Absori, S. H., & Hum, M. DEKLARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA. Di akses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 14.04
- Absori, Khudzaifah Dimyati, Ridwan. 2017. Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam. Hal 332. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018 pukul 19.39.
- Absori. 2017. Pemikiran Hukum Transedental Dalam Konteks Ilmu Hukum Indonesia. Hal 8. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018 pukul 19.53.
- Absori, Khuzaefah Dimyati, Kelik Wardiono. 2008. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif. Mimbar Hukum Jilid 20 terbitan ke II. Hal 367. Diakses pada hari Kamis, 08 Februari 2018 pukul 07.21.
- Budianto. (2008). PELAKSANAAN SISTEM KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN. Tesis. XXXIV diakses pada hari Selasa 21 November 2017 pukul 22.21
- Charis, Abdul and , Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum (2017) *Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development Di Kota Semarang*. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 13.21.
- Darmakusuma Darmanto, Sudarmadji. 2013. PENGELOLAAN SUNGAI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DI DAERAH LERENG SELATAN GUNUNG MERAPI. Jurnal Manusia dan Lingkungan, vol. 20, No. 2, hal 230. Diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 17.10
- Hamdi, M., Dimyati, K., Absori, S. H., & Hum, M. (2016). *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Di akses pada hari Kamis, 25 Januari 2018 pukul 14.11
- Hartuti Purnaweni, 2014. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN KENDENG UTARA PROVINSI JAWA TENGAH. Jurnal Ilmu Lingkungan volume 12, 54. Diakses pada hari Selasa, 21 November 2017 Pukul 22.34.
- Rizka, R., Khudzaifah Dimyati, S. H., Hum, M., Absori, S. H., Hum, M., & Lamsudin, R. (2017). *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transedental* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Hal 21. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018 pukul 20.32.